

Konsep Pemimpin Ideal dalam Pemikiran Al-Farabi dan Al-Mawardi

Concept of the Ideal Leader in the Thoughts of Al-Farabi and Al-Mawardi

Hestyana Widya Pangesti¹ Muthiullah² Rahmat Hidayat³

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2}

Universitas Gadjadh Mada³

Email: widyahesty075@gmail.com¹ mutiullah@uin-suka.ac.id²
dangmat3112@gmail.com³

Article History

Submitted: January 3, 2024

Revised: January 24, 2024

Accepted: January 27, 2024

How to Cite:

Pangesti, Hestyana Widya, dkk. "Konsep Pemimpin Ideal dalam Pemikiran Al-Farabi dan Al-Mawardi." *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Keislaman* 23, no. 2 (2023). 10.14421/ref.v23i2.5203



Abstract

The issue of the ideal leader has been around for a long time and continues to do so from time to time. Various criteria are raised to realize the ideal leader in a country. Al-Farabi and Al-Mawardi are two conceptors who have formulated the concept of an ideal leader. Both have similarities and differences in listing the criteria of the Ideal leader, although both lived during the same dynasty. This research is qualitative with a literature study approach (Library Research). Data is collected by reading the primary books Al-Madinah Al-Fadilah belonging to Al-Farabi and Al-ahkam Al-Sulthaniyyah belonging to Al-Mawardi. The focus of this research is to examine the concept of leadership Al-Farabi and Al-Mawardi. The results showed the similarity of Al-Farabi and Al-Mawardi's thoughts in listing the criteria for leaders, namely having a healthy and complete body and five senses, reason and science, morals and character, courage in defending the country. The difference lies in the details of Al-Farabi's requirements, namely a good and honest speech and away from the pleasures of the world while Al-Mawardi tribal Quraisy and has a balance of all these criteria. Other results Al-Farabi tends to balance the vertical and horizontal relationships on the concept of the ideal leader while Al-Mawardi prioritizes vertical relationships rather than horizontal relationships in the principle of the ideal leader.

Keywords : Ideal Leader; Al-Farabi; Al-Mawardi

Abstrak

Problematika tentang pemimpin ideal sudah ada sejak dahulu yang berlangsung dari zaman ke zaman. Berbagai kriteria dimunculkan untuk mewujudkan pemimpin yang ideal dalam suatu negara. Al-Farabi dan Al-Mawardi adalah dua konseptor yang telah merumuskan konsep pemimpin ideal. Keduanya memiliki kesamaan dan perbedaan dalam mencantumkan kriteria pemimpin Ideal, meskipun keduanya hidup di bawah Dinasti yang sama. Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (Library Research). Data dikumpulkan dengan membaca buku primer Al-Madinah Al-Fadilah milik Al-Farabi dan Al-ahkam Al-Sulthaniyyah karya Al-Mawardi. Fokus penelitian adalah mengkaji konsep kepemimpinan Al-Farabi dan Al-Mawardi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan pemikiran Al-Farabi dan Al-Mawardi dalam mencantumkan kriteria pemimpin yaitu memiliki tubuh dan pancaindera yang sehat dan lengkap, akal dan ilmu pengetahuan, akhlak dan budi pekerti, keberanian dalam membela negara. Perbedaannya ada pada kerincian syarat Al-Farabi yaitu tuturan yang baik dan jujur dan menjauhi kenikamatan dunia sedangkan Al-Mawardi

yaitu bersuku Quraisy dan memiliki keseimbangan seluruh kriteria. Hasil lainnya Al-Farabi cenderung menyeimbangkan hubungan vertikal dan horizontal pada konsep pemimpin idealnya sedangkan Al-Mawardi lebih mengutamakan hubungan vertikal dari pada hubungan horizontal dalam prinsip pemimpin idealnya.

Kata Kunci: Pemimpin Ideal; Al-Farabi; Al-Mawa

A. Pendahuluan

Dalam sejarah Islam, problematika pemimpin ideal sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW yaitu ketika beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah, yang kemudian menjadi kepala negara di Madinah. Bahkan setelah wafatnya Nabi Muhammad, problematika terkait kriteria pemimpin ideal yang berhak memimpin sebuah negara masih berkembang dan terus berlangsung. Problematika tersebut disebabkan karena terbatasnya catatan konsep dan teori politik Islam secara jelas, dan hanya mengandalkan interpretasi dari teks Al-Qur'an dan Hadits.¹ Sehingga catatan tersebut dirasa belum cukup untuk memperjelas bagaimana konsep pemimpin ideal yang dibutuhkan oleh suatu negara.

Kebutuhan tentang sosok pemimpin ideal memicu perdebatan antara paham agama dan politik yang berlangsung hingga zaman klasik. Pada zaman klasik muncul berbagai macam kontra dari masyarakat terkait dengan ide-ide Islam. Perbedaan pendapat pada masyarakat disebabkan atas dasar keyakinan antar individu. Namun, perbedaan itu tidak membuat dan menyebabkan kemunduran peradaban umat Islam, faktanya hal itu menjadi motivasi kebangkitan dan berkembangnya pemikiran politik Islam.² Sehingga pada masa klasik ini muncul beberapa tokoh Islam yang bergelut dengan pemikiran politik Islam. Mereka saling menuangkan gagasan-gagasan teori politiknya dalam Islam, khususnya

¹ Supian, "Diskursus Pemikiran Politik Islam Dari Era Klasik Hingga Pertengahan : Studi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibn Taimiyyah," *Politea : Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (2020), 228, <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2311>.

² Supian, 228.

terkait dengan pemimpin ideal yang berhak untuk memimpin sebuah negara. Terdapat banyak tokoh Islam yang membahas tentang pemimpin ideal, namun dalam artikel ini lebih mengerucut pada pemikiran pemimpin ideal Al-Farabi dan Al-Mawardi.

Dua tokoh di atas yaitu Al-Farabi dan Al-Mawardi merupakan tokoh yang sama-sama hidup pada masa klasik. Al-Farabi yang bernama lengkap Abu Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Farabi lahir pada tahun 257 H,³ sedangkan Al-Mawardi lahir pada tahun 364 H,⁴ yang diketahui bahwa keduanya sama-sama hidup pada masa Dinasti Abbasiyyah. Meskipun keduanya sama-sama hidup pada masa Dinasti Abbasiyyah, namun mereka hidup dengan problematika politik yang berbeda. Al-Farabi dikenal sebagai al-Mu'allim al-Tsani atau guru kedua setelah Aristoteles,⁵ yang dalam pemikiran politiknya, ia membicarakan tentang negara, masyarakat, kekuasaan dan politik.⁶ Pada masanya, kondisi politik Dinasti Abbasiyyah sangat kacau dan terjadi berbagai macam konflik dalam negara dan pemerintahan. Bahkan pada saat itu kekuasaan Dinasti Abbasiyyah diperebutkan oleh negara Turki dan Persia,⁷ sehingga menimbulkan pertumpahan darah dari berbagai golongan suku, ras, dll. Penyebab pertumpahan darah yang tak kunjung usai tersebut juga disebabkan oleh beberapa konflik antara lain adalah karena masalah kekuasaan, popularitas, dan kekayaan.

Sedangkan pada zaman Al-Mawardi, kondisi politik Dinasti Abbasiyyah saat itu mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi, bahkan lebih kalut jika dibandingkan dengan politik masa Al-Farabi hidup.⁸ Keadaan khalifah Abbasiyyah pada masa itu benar-benar dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Pada saat itu, kekuasaan Dinasti Abbasiyyah hanya sebagai formalitas saja sedangkan kekuasaan riilnya dikuasai oleh

³ Abdul Majid, "Filsafat Al-Farabi Dalam Praktek Pendidikan Islam," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 19, no. 1 (2019), 2, <https://doi.org/10.32699/mq.v19i1.1597>.

⁴ Syafruddin Syam, "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* II, no. 02 (2017), 486.

⁵ Qosim Nursheha Dzulhadi, "Al-Farabi Dan Filsafat Kenabian," *Kalimah* 12, no. 1 (2014), 125, <https://doi.org/10.21111/klm.v12i1.222>.

⁶ Edi Sumanto, "Pemikiran Filsafat Politik (Studi Komperatif Al-Farabi Dengan Thomas Aquinas)," *El - Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 6, no. 2 (2017), 1.

⁷ Jamalul Muttaqin and Syamsiyani, "Al-Farabi: Politik Sebagai Jalan Kebahagiaan," *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2022): hlm. 130.

⁸ Rashda Diana, "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam," *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 1 (2017), 161.

Bani Buwaih dan orang-orang Turki.⁹ Sehingga dapat dikatakan bahwasanya pada masa itu terdapat dua kepemimpinan, yaitu pemimpin yang hanya formalitas saja dan pemimpin yang riil mengatur semua urusan. Kedudukan khalifah Dinasti Abbasiyyah ini mulai melebah dan tidak berdaya, sehingga harus membagi kedudukannya kepada panglima-panglima Turki dan Persia yang berkuasa pada saat itu.

Melihat kondisi politik Dinasti Abbasiyyah pada masa kehidupan Al-Farabi dan Al-Mawardi yang sangat kacau, maka tidak heran jika mereka mengeluarkan gagasan politiknya yang bertujuan untuk mencari solusi dari problematika yang ada sehingga dapat membantu negara dan pemerintahan saat itu. Al-Farabi dan Al-Mawardi sama-sama mengeluarkan gagasan politiknya sesuai dengan situasi dan kondisi politik yang mereka alami. Mereka yakin dengan adanya gagasan tersebut dapat membantu memperbaiki masalah politik yang ada, sehingga gagasan tersebut dapat menjadi solusi dari problematika politik saat itu.

Untuk dapat merealisasikan hal di atas, Al-Farabi dan Al-Mawardi menyusun gagasan mereka yang berkaitan dengan teori politik Islam. Gagasan Al-Farabi tentang teori politik Islam ia tuangkan ke dalam karyanya yang berjudul "*Al-Madinah Al-Fadhilah*", sedangkan gagasan Al-Mawardi ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul "*Al-Ahkam as-Sulthoniyyah*". Terciptanya dua karya tersebut bersumber dari kondisi sosial politik pada masa kehidupannya. Dalam kedua karya tersebut, salah satu hal yang mereka tuangkan adalah tentang pemimpin ideal. Bagaimana pemimpin ideal yang dapat memimpin sebuah negara, pemimpin yang bijaksana dan dapat mengayomi masyarakat, dan lain sebagainya.

Sebagai pemikir politik Islam yang besar, sudah banyak penelitian yang membahas tentang pemikiran politik Islam Al-Farabi dan Al-Mawardi. Salah satu penelitian yang membahas tentang Al-Farabi adalah "*Al-Farabi: Politik Sebagai Jalan Kebahagiaan*" yang ditulis oleh Jamalul Muttaqin dan Syamsiyanti.¹⁰ Mereka menjelaskan bahwa semangat ideology yang dikembangkan dan ditawarkan oleh Al-Farabi merupakan

⁹ Syam, "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia.", 487.

¹⁰ Muttaqin and Syamsiyani, "Al-Farabi: Politik Sebagai Jalan Kebahagiaan."

salah satu cara atau jalan untuk mencapai sebuah kehidupan yang bahagia dalam sebuah negara. Mereka juga menjelaskan bahwa pemimpin ideal menurut Al-Farabi tidak hanya seorang filsuf, melainkan juga harus memiliki kearifan yang baik secara pikiran atau rasio dan wahyu. Namun, kebahagiaan dalam sebuah negara tidak hanya bisa dicapai dengan adanya pemimpin yang memiliki kriteria mendekati Nabi atau filsuf, tetapi juga dari ide-ide masyarakat pada negara tersebut.

Kemudian salah satu penelitian yang membahas tentang Al-Mawardi adalah "*Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi*" yang ditulis oleh Ryzka Dwi Kurnia. Dalam penelitiannya, ia menjelaskan bahwa Al-Mawardi mempunyai kriteria ideal untuk seorang imam (khalifah) atau sebagai pemimpin negara, yang di antaranya adalah harus adil, berilmu, memiliki panca indera yang sehat, memiliki organ tubuh yang sehat, berwawasan luas, pemberani. Selain itu, satu hal lagi yang paling penting dalam kriteria pemimpin menurut Al-Mawardi adalah bernasab Quraisy. Al-Mawardi sangat mempertegas bahwa seorang pemimpin atau khalifah harus berasal dari suku Quraisy.

Tulisan ini akan membahas tentang teori politik Al-Farabi dan Al-Mawardi khususnya tentang pemimpin ideal. Meskipun Al-Farabi dan Al-Mawardi terpaut jarak usia yang jauh yaitu kurang lebih satu abad, namun mereka sama-sama mengalami kehidupan pada masa Dinasti Abbasiyyah dengan problematika kepemimpinan politik yang berbeda. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran pemimpin ideal menurut Al-Farabi dan Al-Mawardi, sehingga dapat mengetahui secara jelas gagasan apa yang mereka tawarkan untuk menjadi solusi problematika kepemimpinan politik pada masa mereka hidup. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang sumber data primernya berasal dari karya Al-Farabi "*Al-Madinah Al-Fadhilah*" dan karya Al-Mawardi "*Al-Ahkam as-Sulthoniyyah*". Sedangkan sumber sekunder berasal dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu kemudian menganalisisnya.

B. Urgensi Pemimpin Ideal dalam Kenegaraan

Pada kodratnya, manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain

dan membutuhkan sebuah organisasi kelompok.¹¹ Dengan demikian kebutuhan manusia terhadap sesamanya, mengharuskan ia bertanggungjawab dalam membangun sebuah kehidupan sosial yang damai dan tentram mulai dari berbagai aspek seperti ekonomi, hubungan sosial dan politik. Proses ketergantungan manusia yang dinamis ada dalam suatu negara. Sifat manusia yang secara alamiah dan natural akan selalu memerlukan bantuan orang lain disekelilingnya dalam memenuhi kebutuhannya.¹² Sehingga dalam sistem kenegaraan harus ada seorang pemimpin yang mampu membangun kerjasama diantara dirinya dan rakyatnya. Mengatur dan mengayomi masyarakat guna mewujudkan negara yang aman, damai, tentram, dan bahagia.

Dalam mewujudkan negara impian, baik pemimpin dan rakyat akan menghadapi tantangan dan problematikanya sendiri. Dari masa ke masa problematika yang dihadapi masyarakat beragam, masyarakat membutuhkan pemimpin yang dapat memberikan solusi sebagai jalan keluar dari ihwal yang ada. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat berkolaborasi bersama masyarakatnya saling melakukan timbal balik dalam hal yang positif. Pendapat ini searah dengan pernyataan Ibnu Taimiyyah "Seorang pemimpin yang menjalankan amanat dengan baik adalah yang dapat berlaku adil dan mengajak umatnya untuk taat kepada Allah SWT".¹³ Seorang pemimpin haruslah menjadi pemeran utama, diikuti masyarakatnya yang rela menjadi pemeran cadangan dalam menjalankan pemerintahan, maka dari itu urgensi seorang pemimpin yang ideal sangat dibutuhkan. Banyak dari pemikir politik Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Taimiyyah, Al-Mawardi dan lainnya berlomba memberikan gagasan konsep pemimpin yang relevan, mereka sepakat bahwa suatu negara yang maju dan berkembang dapat dilihat dari pemimpinnya.¹⁴

¹¹ Leni Andariati, "Filsafat Politik Plato," *Jurnal Review Politik* 10, no. 1 (2020), 109.

¹² Endrika Widdia Putri, "Politik Sebagai Jalan Kebahagiaan: Refleksi Filsafat Sosial Dan Politik Islam Al-Fārābī," *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2020): 27, <https://doi.org/10.31958/jsk.v4i1.1889>.

¹³ Muhammad Fajar Pramono, "Urgensi Pemimpin Ideal Menghadapi Sekularisasi Politik Dunia Islam (Telaah Konsep Kepemimpinan Perspektif Ibn Taimiyah)," *Jurnal Tajdid* 21, no. 2 (2022): 305.

¹⁴ Pramono, hlm.134-135.

Menurut Al-Farabi, masyarakat cukup berperan penting bagi negara itu sendiri, sehingga hanya masyarakat berkualitas yang memiliki gagasan cemerlang yang dapat melahirkan sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan dalam suatu negara.¹⁵ Oleh sebab itu, baik negara dan masyarakat memerlukan seorang pemimpin yang ideal yang dapat membawa masyarakat kepada kesejahteraan. Kriteria seorang pemimpin ideal menurut Al-Farabi adalah seorang filsuf yang memiliki sifat seperti Nabi.¹⁶ Jika dalam teori politik Plato lebih menekankan seorang pemimpin lebih kepada jasmaninya, untuk melengkapi teori tersebut Al-Farabi merasa perlu menekankan juga kepada spiritualnya.¹⁷ Sehingga pemimpin yang ideal merupakan pemimpin yang dapat menyeimbangkan antar keduanya yaitu kekuatan jasmani dan spiritual.

Al-Farabi mensyaratkan seorang pemimpin adalah seorang filosof, bukan tanpa alasan, menurutnya seorang filosof dapat mengetahui sifat kebahagiaan sejati (*true nature of happiness*).¹⁸ Selain itu seorang filosof juga dapat hadir di setiap zaman. Menurut Al-Farabi jika tidak ada Nabi yang dapat memimpin negara, maka seseorang yang memiliki sifat mendekati Nabi yang berhak memimpin negara yaitu seorang filsuf.¹⁹ Al-Farabi berfikir untuk dapat menciptakan masyarakat yang ideal harus dimulai dengan seorang pemimpin yang ideal.²⁰ Sejatinya tujuan dari sebuah negara yang ideal tidak lain adalah untuk mencapai sebuah kebahagiaan (*happiness*),²¹ tidak hanya secara materiil tetapi spiritual juga dan tidak saja di dunia ini tetapi juga di akhirat nanti.²² Untuk dapat mencapai kebahagiaan tersebut harus bernegara dan menciptakan simbolisme utuh antara masyarakat dan pemimpin negara, yang hanya dapat diperoleh dalam negara ideal yang sempurna.²³ Kepemimpinan Al-Farabi juga mencontoh dari kepemimpinan Rasulullah SAW untuk umat Islam. Di

¹⁵ Jamalul Muttaqin and Syamsiyani, "Al-Farabi: Politik Sebagai Jalan Kebahagiaan," *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2022): 135.

¹⁶ Nuril Khasyi'in and Mahrida, "Pengembangan Kajian Politik Tokoh Klasik Al-Farabi," *Jurnal Hukum Borneo* 6, no. 2 (2023): 31.

¹⁷ Muttaqin and Syamsiyani, hlm. 135.

¹⁸ Aina Noor Habibah, "Konsep Negara Ideal Dalam Pemikiran Al-Farabi Telaah Kitab Ara Ahl Madinah Al-Fadilah," *Jurnal Spiritualis* 5, no. 2 (2019): 146, <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v5i2.65>.

¹⁹ M. Yusuf Jamil, "Gagasan Al-Farabi Tentang Negara Ideal (Al-Madinat Al-Fadhilat)," *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 7, no. 2 (2016), 172.

²⁰ Habibah, hlm. 146.

²¹ Muttaqin and Syamsiyani, "Al-Farabi: Politik Sebagai Jalan Kebahagiaan," hlm. 135

²² Muhammad Iqbal and Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 10-11.

²³ Ibnu Rusydi, "Filsafat Politik Islam Universitas Islam Negeri," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2015), 117.

mana tugas seorang pemimpin adalah memberikan arahan baik yang sesuai dengan tuntunan agama agar tidak melenceng dari tujuan utama dibentuknya suatu negara, yaitu tercapainya sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁴

Al-Farabi berpendapat bahwa tidak ada satupun warga yang mampu dan dapat menjadi seorang pemimpin Negara yang sempurna. Baginya yang boleh dan yang mampu menjadi seorang pemimpin Negara hanyalah manusia yang paling sempurna, meski kriteria ini akan sangat sulit dan bahkan mustahil. Al-Farabi berusaha merumuskan pilihan kriteria pemimpin jika tidak ada manusia yang sempurna. Menurutnya pemimpin sebuah negara tidak boleh dijabat oleh sembarang orang, hanya orang yang memiliki dua hal yang berhak menjabat sebagai pemimpin negara yaitu fitrah dan tabiat, talenta dan kehendak.²⁵ Negara ideal menurut Al-Farabi merupakan negara yang mampu menciptakan hubungan kerja sama antara pemimpin dan masyarakatnya.²⁶ Baginya, perumpaan pemimpin adalah seperti sebuah hati dan masyarakat adalah anggota tubuh lainnya pada organ tubuh manusia. Hati tersebut harus mampu mengkoordinir, mendengarkan keluh kesah semua anggota tubuh lainnya, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, sehingga mampu mengambil keputusan yang dapat mencapai tujuan dan kemaslahatan bersama.²⁷ Pemimpin negara juga harus ada terlebih dahulu, sebelum adanya rakyat dan terbentuknya masyarakat.²⁸

Sedangkan menurut Al-Mawardi, seorang imam atau khalifah merupakan seorang pemimpin ahli agama di satu pihak dan di pihak lain sebagai pemimpin ahli politik. Hal itu sebagaimana yang dijalankan oleh

²⁴Puji Kurniawan, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 114, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1830>.

²⁵ Abdullah Said, "Filsafat Politik Al-Farabi," *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (2019): 72, <https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i1.4097>.

²⁶ Emita, "Relevansi Konsep Negara Dalam Pemikiran Al-Farabi Di Masa Indonesia Sekarang," *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 2, no. 2 (2021): 93, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i2.47791>.

²⁷ Emita, hlm. 95.

²⁸ Imam Sukardi, "Negara Dan Kepemimpinan Dalam Pemikiran Al-Farabi," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 14, no. 2 (2017), 284-285, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i2.959>.

Rasulullah SAW dan keempat sahabatnya²⁹, di mana Rasulullah SAW menampilkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang dapat menyeimbangkan antara kemaslahatan duniawi dan ukhrawi bagi umatnya.³⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa kepemimpinan (*khalifah*) itu mengambil alih peran Rasulullah SAW dalam menjaga agama dan mengatur dunia.³¹ Kepemimpinan (imamah) yang dimaksud Al-Mawardi adalah sebuah kepemimpinan yang dijabat oleh khalifah atau pemimpin (*al-ra'is*), raja (*al-mulk*), penguasa (*al-sulthan*) atau kepala negara (*qa'id al-daulat*) yang kemudian diberikan label agama.³² Di mana jabatan sebagai seorang pemimpin bukan jabatan yang mudah, karena seorang pemimpin harus siap dan memiliki ilmu yang cukup dan mumpuni.³³

Kata Al-Mawardi, dasar pembentukan imamah (kepemimpinan) adalah wajib secara ijma' ulama, yang pelembagaannya adalah fardhu kifayah, seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Menurut Al-Mawardi karena manusia merupakan makhluk sosial dan di dalam kesehariannya mungkin terjadi sebuah perselisihan, penganiayaan, permusuhan dan lainnya, maka diperlukan seorang pemimpin yang dapat mencegah terjadinya hal tersebut.³⁴ Ia juga berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memiliki dua unsur yaitu *ahl al-ikhtiyar* (orang yang berhak memilih) dan *ahl al-imamah* (orang yang berhak untuk dipilih menjadi kepala negara). Untuk ahl al-ikhtiyar sendiri terdapat beberapa syarat yaitu kredibilitas pribadinya atau keseimbangan, mempunyai ilmu atau orang yang berilmu sehingga ia tau siapa yang berhak dan pantas untuk menjadi seorang pemimpin, dan memiliki pendapat yang kuat agar mampu mempertahankan siapa yang pantas menjadi seorang pemimpin.³⁵

Menurut Al-Mawardi, pemilihan kepala negara dapat sukses jika ditempuh dengan dua cara yaitu dipilih langsung oleh *Ahlu al-Hall wa al-'Aqd* dan adanya wasiat atau penunjukkan secara langsung oleh imam atau

²⁹ Mahsun Fuad, "Diskursus Pemikiran Politik Islam Pra Modern," n.d., 4.

³⁰ Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018), 265.

³¹ Ryzka Dwi Kurnia, "Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi," *Jurnal Politika* 6, no. 1 (2019), 77.

³² Muhajir, "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia," *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* X, no. 1 (2023), 90.

³³ Difa Farid Al-Fajri et al., "Pemimpin Non Muslim Dalam Negara Mayoritas Islam Menurut Al-Mawardi: Kajian Hukum Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 2 (2023), 380, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25578>.

³⁴ Moch Yunus, "Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Imam (Khalifah)," *Humanistika: Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (2020), 198.

³⁵ Amir Sahidin, "Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis)," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2021), 76.

pemimpin sebelumnya.³⁶ Ia juga menyatakan bahwa dalam satu negara tidak boleh dipimpin oleh dua orang kepala negara. Jika dalam sebuah negara terdapat dua kepemimpinan, maka pemimpin yang sah adalah yang tinggal satu wilayah dengan pemimpin sebelumnya.³⁷ Bagi Al-Mawardi negara merupakan suatu alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat. Sehingga dalam konsepnya sendi pertama yang paling penting untuk pedoman negara adalah agama.³⁸ Karena agama dan negara saling membutuhkan, agama membutuhkan negara karena dengan adanya negara maka agama dapat berlembaga. Sedangkan negara membutuhkan agama karena dengan agama maka negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.

C. Pemimpin Ideal Menurut Al-Farabi

Menurut Al-Farabi orang yang berhak menjadi seorang pemimpin, harus memiliki dua belas kriteria ideal. Hal itu ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul “Al-Madinah Al-Fadhilah”, ia menyebutkan:

مِثْلُ هَذَا الرَّجُلِ يَكُونُ رَئِيسَ الْمَدِينَةِ وَالْمَعْمُورَةِ.

وَيَكُونُ مُنْصِيفاً بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ خَصْلَةً، مِنْهَا مَا يَخُصُّ الْجِسْمَ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ تَامَ الْأَعْضَاءِ، يَقُومُ كُلُّ غَضُو بِوُظُفَتِهِ. وَمِنْهَا مَا يَخُصُّ الْعَقْلَ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ جَيِّدَ الْفَهْمِ، جَيِّدَ الْحِفْظِ، ذَكِيّاً، حُسْنَ الْعِبَارَةِ، مُتَحَبِّباً لِلتَّعْلِيمِ. وَمِنْهَا مَا يَخُصُّ الْأَخْلَاقَ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ شَرِّهِ، مُحِبّاً لِلصِّدْقِ، كَبِيرَ النَّفْسِ، غَيْرَ مُتَمَسِّكِ بِأَعْرَاضِ الدُّنْيَا/ مُحِبّاً لِلْعَدْلِ، قَوِيَّ الْعَزِيمَةِ.³⁹

Menurutnya perumpamaan seorang laki-laki sebagai pemimpin kota atau sebagai pemimpin memiliki sifat dua belas yang ia klasifikasikan ke dalam tiga bagian yaitu berkaitan dengan tubuh, fikiran atau akal dan akhlak.

³⁶ Sahidin, 76.

³⁷ Abdul Hayyie Al-Kattani and Kamaluddin Nurdin, *Terjemahan Al-Abkamus-Sulthaaniyyah Wal-Wilaayaatud-Diiniyyah*, Pertama (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 23-24.

³⁸ Diana, “Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam.”, 165.

³⁹ Al-Farabi, “Kitab Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah” (Beirut, Lebanon: Dar al-Mashriq, 1986), 28.

1. Memiliki tubuh yang baik dan anggota tubuh yang lengkap (agar semua bagian tubuh dapat melakukan kegiatannya dengan maksimal)
2. Memiliki akal yang baik
3. Memiliki kemampuan faham yang baik
4. Memiliki hafalan atau daya ingat yang baik dan cerdas
5. Memiliki ungkapan-ungkapan yang baik sehingga dapat mengekspresikannya dengan baik
6. Menyukai belajar
7. Memiliki akhlak yang baik (agar tidak melakukan hal yang buruk)
8. Senang berkata jujur dan mencintai kejujuran
9. Memiliki wibawa dan berjiwa besar
10. Tidak terlena dengan dunia sehingga tidak berpegang teguh pada kehormatan dunia
11. Senang berbuat adil
12. Memiliki tekad yang kuat sehingga berani melakukan hal apapun demi negara

Dari dua belas kriteria pemimpin ideal menurut Al-Farabi di atas, penulis mengambil empat poin utama yang menjadi asas dua belas poin lainnya, yang memiliki kemiripan dengan konsep pemimpin ideal menurut Al-Mawardi. **Pertama**, sebagai seorang pemimpin atau kepala harus memiliki tubuh yang baik dan anggota tubuh yang lengkap. Lengkap yang dimaksud Al-Farabi adalah sempurna secara fisik, tidak kurang sesuatu apapun (tidak cacat). Hal ini tentu berdampak pada proses memimpin yang akan lebih leluasa dan stabil dengan anggota tubuh sempurna. Hal sebaliknya dengan adanya cacat fisik pada tubuh seorang pemimpin akan menghambat kinerja suatu pemimpin. Pemimpin yang memiliki fisik cacat tidak akan luput dari omongan masyarakat atau petugas bawahannya. Al-Farabi memperkirakan hal butuk tersebut, sehingga ia menyatakan kelengkapan anggota tubuh secara fisik adalah hal mutlak yang harus dipenuhi.

Kedua, sebagai seorang pemimpin harus memiliki akal yang baik. Dengan memiliki akal yang baik, seorang pemimpin akan mempunyai kemampuan faham yang baik. Ia juga akan mempunyai hafalan atau daya ingat yang baik dan cerdas sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan dengan baik. Sebagai seorang pemimpin juga harus menyukai belajar, agar keilmuannya bertambah dan dapat menambah wawasan serta memiliki sudut pandang dan pola pikir yang majemuk. Dengan memiliki kecerdasan dan akal yang baik, seorang pemimpin akan dapat memahami permasalahan yang terjadi di negaranya, sehingga ia akan dapat dengan mudah mengambil keputusan yang bijak untuk permasalahan tersebut dan dapat merencanakan kebijakan yang lebih efektif.

Ketiga, senang berbuat adil. Menurut Al-Farabi sebagai seorang pemimpin sejati harus senang berbuat adil dan mampu menegakkan sebuah keadilan dalam pemerintahannya. Baginya, sebuah keadilan ini menjadi prinsip utama yang harus dilakukan dan ditegakkan oleh seorang pemimpin, dan menjadi sebuah pondasi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Keadilan juga merupakan sumber untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat mencegah adanya konflik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Sikap adil dilakukan tidak memandang status sosial, suku, ras dan agama, melainkan semua warga negara harus mendapatkan keadilan yang rata. Maka dari itu, seorang pemimpin harus senang berbuat adil dan memiliki moralitas dan integritas yang baik dalam memutuskan sebuah tindakan.

Keempat, sebagai seorang pemimpin harus memiliki tekad yang kuat. Menurut Al-Farabi seorang pemimpin harus kuat dan memiliki tekad yang tegas untuk kepentingan negara. Ia merincikan komponen-komponen tekad menjadi beberapa unsur yaitu tekad untuk mencapai kebijaksanaan (*hikmah*), tekad untuk menegakkan keadilan (*adalah*), tekad untuk membentuk masyarakat yang baik (masyarakat ideal), tekad untuk mencapai keamanan dan ketertiban, tekad untuk mencapai kesejahteraan rakyat, tekad untuk pendidikan dan pembangunan intelektual, dan tekad untuk menciptakan harmoni

sosial. Perincian tekad tersebut tentunya terdapat tujuan yang diinginkan oleh Al-Farabi.

Seperti tekad mencapai kebijaksanaan (*hikmah*), Al-Farabi berharap bahwa seorang pemimpin harus mencapai kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan agar sebuah negara dapat berkembang dengan baik. Tekad menegakkan keadilan (*adalah*), Al-Farabi berharap seorang pemimpin mempunyai komitmen untuk berlaku adil di dalam negara yang ia pimpin, adil tersebut berlaku untuk semua warga negara di sana tanpa memandang status sosialnya. Tekad membentuk masyarakat yang baik (masyarakat ideal), dalam hal ini seorang pemimpin harus berusaha membentuk masyarakat yang memiliki nilai moral yang baik dan juga harus bisa meningkatkan kehidupan spiritual. Tekad menjaga keamanan dan ketertiban, seorang pemimpin harus bisa menjaga keamanan dalam negara agar masyarakat dapat berkembang dengan baik dan tidak merasa terancam dalam hal apapun.

Kemudian tekad mencapai kesejahteraan rakyat, dalam hal ini seorang pemimpin harus memiliki tekad kuat dan fokus untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya, misalnya dengan cara lebih memperhatikan lagi kebutuhan dasar dan kualitas hidup rakyatnya. Tekad pendidikan dan pembangunan intelektual, seorang pemimpin harus dapat memajukan pendidikan dan pembangunan intelektual masyarakat agar dapat maju, berkembang dan mencapai kebijaksanaan. Tekad menciptakan harmoni sosial, dalam hal ini seorang pemimpin harus bisa menciptakan keharmonian dalam masyarakat agar dapat mengatasi konflik yang ada dan dapat membangun kesatuan rakyatnya. Al-Farabi berpendapat bahwa seorang pemimpin yang memiliki tekad kuat dan berani harus mampu mengatasi segala hal yang terjadi dalam negara untuk mencapai tujuan moral dan politik yang baik, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

D. Pemimpin Ideal Menurut Al-Mawardi

Menurut Al-Mawardi orang yang berhak menjadi seorang pemimpin, harus memiliki tujuh kriteria ideal. Hal itu ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul “Al-Ahkam as-Sulthaniyyah”, ia menyebutkan:

وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة. أحدها : العدالة على شروطها الجامعة. والثاني : العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. والثالث : سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. والرابع : سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء

الحركة وسرعة النهوض. والخامس : الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. والسادس الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. والسابع (النسب وهو أن يكون) من قریش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه، ولا اعتبار بضرار حين شد فجوزح جميع الناس، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادَةَ، عليه أن يقول "الأئمة من قریش".⁴⁰

Bagi Al-Mawardi, terdapat tujuh syarat untuk menjadi seorang imam atau pemimpin:

1. Memiliki keseimbangan yang memenuhi semua kriteria
2. Seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan
3. Harus memiliki pancaindera yang lengkap dan sehat
4. Memiliki anggota tubuh yang lengkap dan tidak ada kekurangannya
5. Memiliki visi pemikiran yang baik
6. Mempunyai sifat keberanian dalam menjaga rakyat
7. Bernasab Quraisy (mempertahankan etnis Quraisy karena kemampuan dan kewibawaannya)⁴¹

Dari tujuh kriteria pemimpin ideal menurut Al-Mawardi dan dua belas poin kriteria pemimpin ideal menurut Al-Farabi di atas, penulis mengambil tiga poin dasar kepemimpinan Al-Mawardi yang memiliki kesamaan nilai. *Pertama*, sebagai seorang pemimpin atau kepala negara ia harus memiliki anggota tubuh yang sempurna tidak kurang satu pun atau cacat. Jika seorang pemimpin memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap atau cacat, maka akan mengurangi kompetensinya dan kualitas jasmaninya sebagai acuan seorang imam (pemimpin). Persyaratan pertama boleh saja diikuti atau dipatuhi, namun kualifikasi inilah yang ditekankan Al Mawardi. Menurut Al-Mawardi tiga macam kekurangan yang dimaksud yaitu kekurangan kelengkapan anggota tubuh, kekurangan kesempurnaan pada pancaindera, dan kekurangan fungsi anggota tubuh dan panca indera dalam melakukan fungsinya atau gerakan.⁴²

⁴⁰ Al-Mawardi, "Al-Ahkam Al-Sulthaniyah" (Kuwait: Jami'atu Kuwait: Qismu Al-'Ulum As-Siyaasiyyah, 1989), 5.

⁴¹ Muhajir, "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia.", 88.

⁴² Al-Kattani and Nurdin, *Terjemahan Al-Abkamus-Sulthaaniyyah Wal-Wilaayaatud-Diiniyyah*.

Ketidaksempurnaan pancaindera dipermisalkan dengan cacatnya penglihatan. Menurut Al-Mawardi ada beberapa keadaan yang merugikan dan dapat terjadi pada pemimpin karena keterbatasan penglihatannya, yaitu seorang pemimpin tersebut mengetahui adanya seseorang didekatnya, namun dengan ketidakmampuan penglihatannya ia tidak dapat mengenalinya. Ketidaksempurnaan ini akan menghalangi seorang individu untuk menjadi pemimpin atau seorang pemimpin tidak dapat melanjutkan masa kepemimpinannya. Hal ini yang tidak diperbolehkan untuk kriteria seorang pemimpin ideal. Namun, jika gangguan pada pancainderanya hanya rabun mata dan lemahnya penglihatan (ia masih dapat mengenali orang saat melihatnya), ini masih diperbolehkan untuk memangku dan melanjutkan jabatannya. Namun, ada juga ketidaksempurnaan pancaindera yang tidak mempengaruhi tugas seorang pemimpin yaitu hilangnya penciuman dan hilang daya kecapnya yang bersifat sementara. **Kedua**, sebagai seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin (imamah), pemimpin dapat membenarkan perilaku masyarakat yang menyimpang dan menyeleweng.

Ketiga, sebagai seorang pemimpin harus memiliki visi pemikiran yang baik. Menurut Al-Mawardi sebagai seorang pemimpin harus memiliki pemikiran yang baik yang sesuai dengan prinsip Islam dan hukum-hukum yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai seorang pemimpin (imamah) ia harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi dengan fokus utamanya adalah sebuah keadilan, kesejahteraan umum dan ketaatan kepada prinsip-prinsip Islam. Dalam mengambil sebuah keputusan seorang pemimpin harus mengutamakan keadilan dan kebenaran. Sehingga ia harus berlaku adil terhadap rakyatnya dan tidak boleh memihak kepada kelompok tertentu.⁴³ Selain itu, pemimpin juga harus dapat memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dan bekerja untuk kesejahteraan umum. Dengan memiliki visi pemikiran yang baik, seorang pemimpin akan tegas dan dapat konsisten dalam menjalankan segala sesuatu. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan memberikan kesejahteraan.⁴⁴

⁴³ Syam, "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia.", 490-491.

⁴⁴ Muhammad Amin, "Pemikiran Politik Al-Mawardi," *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016), 160, <https://doi.org/10.24252/jpp.v4i2.2744>.

Keempat, sebagai seorang pemimpin harus mempunyai sifat keberanian dalam menjaga rakyat. Sehingga sebagai seorang pemimpin harus dapat melindungi dan mempertahankan rakyatnya dari serangan musuh.⁴⁵ Al-Mawardi berpendapat dalam hal keberanian, jika terdapat dua calon kepala pemimpin salah satunya lebih berpengetahuan dan satunya lebih berani, maka yang dipilih untuk menjadi seorang pemimpin harus melihat keadaan dan kondisi negara pada saat itu. Jika keadaan dan kondisi negara pada saat itu membutuhkan pemimpin yang berani karena terdapat ancaman yang menimbulkan pemberontakan pada negara, maka seseorang yang memiliki keberanian yang berhak memangku jabatan sebagai seorang pemimpin. Sementara, jika keadaan dan kondisi negara membutuhkan seorang pemimpin yang pandai dan berpengetahuan guna membenarkan orang-orang yang menyimpang, maka seseorang yang lebih berpengetahuan yang berhak memangku jabatan sebagai seorang pemimpin.

Menurut Al-Mawardi, sifat berani (*syaja'ah*) merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin (*imamah*). Sama halnya dengan Al-Farabi, Al-Mawardi juga merincikan komponen berani ke dalam beberapa unsur, yaitu berani dalam menegakkan keadilan dan juga berani dalam melawan ketidakadilan. Dalam hal ini sebagai seorang pemimpin harus berani dalam menegakkan sebuah keadilan dan melawan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam negara.⁴⁶ Kemudian berani dalam mengambil keputusan yang sulit dan berani dalam menghadapi tantangan. Sebagai seorang pemimpin harus berani dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya keputusan baik yang harus ia ambil, ia juga harus berani dalam menghadapi tantangan yang ada selama menjalankan tugas kepemimpinannya. Berani dalam mempertahankan negara dan membela kebenaran. Seorang pemimpin harus berani mempertahankan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman luar yang membahayakan mereka. Seorang pemimpin juga harus dapat mempertahankan kebenaran dan nilai moral dalam situasi

⁴⁵ Diana, "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam.", 165-166.

⁴⁶ Al-Kattani and Nurdin, *Terjemahan Al-Abkamus-Sulthaaniyyah Wal-Wilaayaatud-Diiniyyah*.

apapun. Serta berani dalam mengoreksi diri sendiri, yaitu harus berani mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki perilaku dan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam.

E. Pemimpin Solusional dalam Pemikiran Al-Farabi dan Al-Mawardi: Sebuah Analisa Kritis

Berangkat dari rumusan masalah diatas, rumusan tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan diantaranya adalah bagaimana Al-Farabi dan Al-Mawardi menampilkan elemen-elemen yang ideal dalam menentukan pemimpin yang ideal? Bagaimana seorang pemimpin dapat mengontrol dirinya menjadi sosok pemimpin yang ideal? Apakah faktor dominan keberhasilan seorang pemimpin mengayomi masyarakatnya? Menariknya dibagian ini baik Al-Farabi dan Al-Mawardi memiliki kesamaan dan perbedaan dalam menentukan komponen seorang pemimpin yang ideal yang dipercaya dapat menjadi teladan dalam memajukan suatu negara. Kedua tokoh tersebut sepakat bahwa pemimpin yang ideal harus memiliki anggota tubuh dan panca indera yang sehat dan lengkap, seorang pemimpin harus memiliki akal dan ilmu pengetahuan yang baik. Seorang pemimpin juga harus memiliki keberanian dalam membela negara dan masyarakatnya dan terkahir seorang pemimpin harus memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik.

Table 1. Persamaan Kriteria Pemimpin Ideal Al-Farabi dan Al-Mawardi

No	Al-Farabi	Al-Mawardi
1	<i>An yakuuna tamma al a'do'i yaquumu kullu 'udwin biwazifatihi</i> (Memiliki tubuh yang baik dan anggota tubuh yang lengkap agar semua bagian tubuh dapat melakukan kegiatannya dengan maksimal)	<i>Salaamatu al-Hawaasi mina as sam'i wal bashari wal lisaani li yasihha ma'ahaa mubaasyiratun ma yadriku biha</i> (Harus memiliki pancaindera yang lengkap dan sehat) <i>Salamatul al-A'do'i min naqsin yamna'u 'an istiifaa'i al-harakati wa sur'atu an-nahdi</i> (Memiliki anggota tubuh yang lengkap dan tidak ada kekurangannya)

2	<p><i>Minha maa yakhussu al-‘Aqlu</i> (Memiliki akal yang baik)</p> <p><i>Wa hiya an yakuuna jayyidu al fahmi</i> (Memiliki kemampuan faham yang baik)</p> <p><i>Dzakiyyan</i> (Memiliki hafalan atau daya ingat yang baik dan cerdas (objek pengetahuan))</p> <p><i>Mutsahhiban Lit Ta’limi</i> (Menyukai belajar)</p>	<p><i>Al-‘Ilmu al-Mu’addi Ila al-Ijtahaadi fii an nawaazali wa al-ahkaami</i> (Seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan)</p>
3	<p><i>Qawiiyu Al ‘Aziimati</i> (Memiliki tekad yang kuat sehingga berani melakukan hal apapun demi Negara)</p>	<p><i>As-Syajaa’atu wa an-najdatu al-mu’diyatu ila himaayati al baydoti wa jihaadi al-‘Aduwwi</i> (Mempunyai sifat keberanian dalam menjaga rakyat dan melawan musuh)</p>
4	<p><i>Kabiiru an Nafsi</i> (Memiliki wibawa dan berjiwa besar)</p> <p><i>Muhibban lil ‘Adli</i> (Senang berbuat adil)</p> <p><i>Minha maa Yakhussu al Akhlaaqu Wa Hiya an Yakuuna Ghairi Syarrihi</i> (Memiliki akhlak yang baik, agar tidak melakukan hal yang buruk)</p>	<p><i>Ar Ra’yu al-Mufdi Ila siyaasati ar ra’iyyati wa tadbiiri al mashaslihi</i> (Memiliki visi pemikiran yang baik)</p>

Dalam perbedaan komponen elemen pemimpinan yang ideal juga terjadi antara Al-Farabi dan Al-Mawardi. Al-Farabi memiliki tiga poin yang berbeda, sedangkan Al-Mawardi memiliki dua poin yang berbeda. Al Farabi merincikan bentuk akhlak yang mulia dengan lebih spesifik dengan mencantumkan ke dalam dua kriteria yang ia miliki yaitu memiliki tutur yang baik ketika berbicara dan jujur dalam berkata. Ia menambahkan satu poin lainnya yang tidak terdapat di Al-Mawardi yaitu tidak mengutamakan kenikmatan dunia, karena menurut Al-Farabi menjadi pemimpin akan rentan dengan kenikmatan dan kekuasaan yang ada di dunia, kegelisahan inilah yang mengarahkannya untuk menambahkan poin menjauhi kenikmatan dan kesenangan di dunia. Sedangkan Al-Mawardi memiliki dua poin yang berbeda, pertama memiliki kesempurnaan dan keseimbangan, poin ini ia letakan di bagian paling atas yang menandakan Al-Mawardi menginginkan pemimpin yang sempurna, meski hal tersebut yang paling sulit untuk diwujudkan, namun ia percaya sosok yang sempurna akan menjadi pemimpin ideal yang membawa kebaharuan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Poin berikutnya dia mensyaratkan seorang pemimpin harus bernasab Quraisy, syarat ini akan tergerus dengan zaman karena suku Quraisy hanya ada di Arab khususnya Arab Saudi, tentu syarat ini tidak dapat diwujudkan di negara di luar Arab Saudi.

Table 2. Perbedaan Kriteria Pemimpin Ideal Al-Farabi dan Al-Mawardi

No	Al-Farabi	Al-Mawardi
1	<i>Husnul 'Ibarati</i> (Memiliki ungkapan-ungkapan yang baik sehingga dapat mengekspresikannya dengan baik (berbicara baik))	Tidak ada
2	<i>Muhibban Lis Shidqi</i> (Senang berkata jujur dan mencintai kejujuran (berbicara jujur))	Tidak ada
3	Tidak ada	<i>Al-'Adalatu 'ala syurutiha al-jaami'atu</i> (Memiliki keseimbangan yang memenuhi semua kriteria)

4	Tidak ada	<i>An Yakuna min Quraisyin</i> (Bernasab Quraisy)
5	<i>Ghairu Mutamassikin bi I'radi ad dunyaa</i> (Tidak terlena dengan dunia sehingga tidak berpegang teguh pada kehormatan dunia)	Tidak ada

Hubungan yang terjalin disekitar pemimpin adalah hubungan vertikal antara pemimpin dan pembesar negara. Tak dipungkiri kebutuhan untuk pematangan diri sendiri dibutuhkan sebagai stimulus membangun kepercayaan antara sesama pelaksana pemerintahan. Hubungan vertikal juga bisa diwujudkan dengan perhatian kepada diri sendiri sebagai modal merangkul para pejabat yang derajatnya sangat dekat dengan pemimpin. Di samping itu juga dibutuhkan keseimbangan antara hubungan yang horizontal kebawah antara pemimpin dan masyarakat dibawahnya. Keharmonisan antara hubungan vertikal dan horizontal bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu diperlukan jam terbang tinggi dari seorang pemimpin yang ingin menjadi pemimpin negara.

Table 3. Hubungan Vertikal dan Horizontal dalam Pemikiran Pemimpin Ideal Al-Farabi

No	Hubungan Vertikal Antara Diri Sendiri/Pembesar Negara	Hubungan Horizontal Kepada Masyarakat
1	Tubuh yang lengkap	Tuturan yang baik
2	Aka	Akhlak yang baik
3	Pemahaman	Berkata jujur
4	Hafalan dan cerdas	Wibawa dan jiwa besar

5	Menyukai belajar	Adil
6	Tidak gila dunia	Tekad dan berani demi Negara

Dalam analisis yang dilakukan penulis, Al-Farabi berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan vertikal dan horizontal. Hal ini dapat dilihat komponen yang berporos pada diri sendiri ada enam komponen yaitu tubuh dan panca indera yang lengkap, akal yang sehat, pemahaman yang baik, hafalan dan cerdas, menyukai belajar dan tidak tamak dunia. Sedangkan untuk hubungan horizontal yang berporos pada perlakuan kepada orang lain juga memiliki enam komponen sama dengan komponen vertikal yaitu memiliki tuturan yang baik, berakhak baik, berkata jujur, berjiwa besar, adil dan memiliki tekad dan berani membela negara. Dengan kesamaan ini terlihat adanya usaha menyeimbangkan antara unsur vertikal dan horizontal. Sedangkan Al-Mawardi memilki perbedaan dengan Al-Farabi yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4. Hubungan Vertikal dan Horizontal dalam Pemikiran Pemimpin Ideal Al-Mawardi

No	Hubungan Vertikal Antara Diri Sendiri/Pembesar Negara	Hubungan Horizontal Kepada Masyarakat
1	Keseimbangan	Pemikiran yang baik
2	Memiliki ilmu pengetahuan	Berani dan menjaga rakyat
3	Pancaindera yang lengkap	
4	Anggota tubuh lengkap dan sehat	
5	Bernasab Quraisy	

Berbeda dengan Al-Farabi, Al-Mawardi memberikan porsi peningkatan diri sendiri lebih banyak dari pada Al-Farabi. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas. Dari tujuh kompoen pemimpin yang ideal lima diantaranya digunakan untuk menguatkan hubungan vertikal yang berporos pada diri sendiri. Pemantangan kensep diri sendiri yaitu

keseimbangan, memiliki ilmu pengetahuan, pancaindera yang lengkap, anggota tubuh lengkap dan sehat, dan bernasab Quraisy. Sedangkan untuk porsi hubungan ke bawah antara pemimpin dan rakyat atau secara horizontal hanya terdapat dua porsi yaitu pemikiran yang baik, dan berani menjaga rakyat. Tentu Al-Mawardi memiliki kecenderungan yaitu untuk mewujudkan pemimpin yang ideal harus memperhatikan kesempurnaan kearakter pemimpin yang nantinya apabila diterapkan akan mewujudkan kebahagiaan ditengah masyarakat.

Pemimpin negara bukanlah orang yang baru belajar memimpin. Namun dia adalah sosok yang memiliki pengalaman memimpin dan memiliki strategi menyelesaikan masalah dengan tepat dan akurat. Seorang koordinator institusi baru akan mudah mengkondisikan para pekerjanya, jika ia memiliki pengalaman dan mau terus belajar. Oleh karena itu, Al-Farabi dan Al-Mawardi menyepakati empat komponen utama yaitu memiliki tubuh dan pancaindera yang sehat dan lengkap, memiliki akal dan ilmu pengetahuan, memiliki akhlak dan budi pekerti, dan memiliki keberanian dalam membela negara sebagai asas dan kunci pemimpin untuk memiliki karakter yang terbentuk dari unsur positif dalam diri dan pengalaman yang banyak.

F. Kesimpulan

Kecenderungan Al-Farabi dalam merumuskan konsep pemimpin yang ideal sangat imbang antara pembentukan karakter pemimpin yang berporos pada diri sendiri (vertical) dan pembentukan pemimpin untuk bersosialisasi dengan masyarakat kebawah (horizontal). Hal ini terbukti dengan dua belas komponen pemimpin ideal yang ia susun, di mana enam komponen mengacu kepada hubungan vertical atau antara diri sendiri/pembesar negara, dan enam lainnya lebih mengarah kepada hubungan horizontal atau kepada masyarakat. Sedangkan Al-Mawardi memberikan porsi peningkatan diri sendiri lebih banyak daripada Al-Farabi. Dari tujuh komponen pemimpin ideal yang ia susun, lima diantaranya condong kepada hubungan vertical atau terhadap diri sendiri/pembesar negara, sedangkan untuk hubungan horizontal atau kepada masyarakat hanya terdapat dua komponen saja.

Kedua kriteria pemimpin ideal yang sudah dijelaskan pada pembahasan di atas sulit untuk direalisasikan pada zaman modern, karena akan melepaskan salah satu komponen dari kedua tokoh tersebut yaitu Al-Farabi dan Al-Mawardi. Karena Al-Farabi menuntut seorang pemimpin harus seorang filsuf yang mempunyai sifat mendekati Nabi, sedangkan Al-Mawardi menuntut pemimpin harus memiliki keseimbangan secara menyeluruh dan harus bernasab Quraisy. Hal ini tidak akan bisa dan akan tergerus dengan zaman karena suku Quraisy hanya ada di Arab khususnya Arab Saudi, tentu syarat ini tidak dapat diwujudkan di negara non-Arab.

Daftar Pustaka

- Al-Fajri, Difa Farid, Siti Ngainnur Rohmah, Mufidah, and Abdur Rahim. "Pemimpin Non Muslim Dalam Negara Mayoritas Islam Menurut Al-Mawardi: Kajian Hukum Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25578>.
- Al-Farabi. "Kitab Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah." Beirut, Lebanon: Dar al-Mashriq, 1986.
- Al-Kattani, Abdul Hayyie, and Kamaluddin Nurdin. *Terjemahan Al-Ahkamus-Sulthaaniyyah Wal-Wilaayaatud-Diiniyyah*. Pertama. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Mawardi. "Al-Ahkam Al-Sulthaniyah." Kuwait: Jami'atu Kuwait: Qismu Al-'Ulum As-Siyaasiyyah, 1989.
- Amin, Muhammad. "Pemikiran Politik Al-Mawardi." *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.24252/jpp.v4i2.2744>.
- Andariati, Leni. "Filsafat Politik Plato." *Jurnal Review Politik* 10, no. 1 (2020).
- Diana, Rashda. "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam." *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 1 (2017).
- Dzulhadi, Qosim Nursheha. "Al-Farabi Dan Filsafat Kenabian." *Kalimah* 12, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.21111/klm.v12i1.222>.
- Emita. "Relevansi Konsep Negara Dalam Pemikiran Al-Farabi Di Masa Indonesia Sekarang." *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 2, no. 2 (2021): 88. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i2.47791>.
- Fuad, Mahsun. "Diskursus Pemikiran Politik Islam Pra Modern," n.d., 1–9.
- Habibah, Aina Noor. "Konsep Negara Ideal Dalam Pemikiran Al-Farabi Telaah Kitab Ara Ahl Madinah Al-Fadhilah." *Jurnal Spiritualis* 5, no. 2 (2019): 134–52. <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v5i2.65>.
- Iqbal, Muhammad, and Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Jamil, M. Yusuf. "Gagasan Al-Farabi Tentang Negara Ideal (Al-Madinat Al-Fadhilat)." *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 7, no. 2 (2016).

- Khasyi'in, Nuril, and Mahrida. "Pengembangan Kajian Politik Tokoh Klasik Al-Farabi." *Jurnal Hukum Borneo* 6, no. 2 (2023): 25–40.
- Kurnia, Ryzka Dwi. "Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi." *Jurnal Politica* 6, no. 1 (2019).
- Kurniawan, Puji. "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 101–15. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.l830>.
- Majid, Abdul. "Filsafat Al-Farabi Dalam Praktek Pendidikan Islam." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 19, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.32699/mq.v19i1.l597>.
- Muhajir. "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia." *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* X, no. I (2023).
- Muttaqin, Jamalul, and Syamsiyani. "Al-Farabi: Politik Sebagai Jalan Kebahagiaan." *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2022): 129–44.
- Pramono, Muhammad Fajar. "Urgensi Pemimpin Ideal Menghadapi Sekularisasi Politik Dunia Islam (Telaah Konsep Kepemimpinan Perspektif Ibn Taimiyah)." *Jurnal Tajdid* 21, no. 2 (2022): 301–26.
- Putri, Endrika Widdia. "Politik Sebagai Jalan Kebahagiaan: Refleksi Filsafat Sosial Dan Politik Islam Al-Fārābī." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2020): 25. <https://doi.org/10.31958/jsk.v4i1.l889>.
- Rahmawati. "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia." *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018).
- Rusydi, Ibnu. "Filsafat Politik Islam Universitas Islam Negeri." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2015).
- Sahidin, Amir. "Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis)." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2021).
- Said, Abdullah. "Filsafat Politik Al-Farabi." *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (2019): 63–78. <https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i1.4097>.
- Sukardi, Imam. "Negara Dan Kepemimpinan Dalam Pemikiran Al-Farabi." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 14, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i2.959>.
- Sumanto, Edi. "Pemikiran Filsafat Politik (Studi Komperatif Al-Farabi Dengan Thomas Aquinas)." *El - Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 6, no. 2 (2017).
- Supian. "Diskursus Pemikiran Politik Islam Dari Era Klasik Hingga Pertengahan: Studi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibn Taimiyyah." *Politea: Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.231l>.

- Syam, Syafruddin. "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* II, no. 02 (2017).
- Yunus, Moch. "Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Imam (Khalifah)." *Humanistika: Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (2020).